

PENYEDIAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER PADA RUANG TERBUKA PUBLIK DI KOTA LAMA SEMARANG

Landung Esariti*, Khafida Erning Ariyanti, Marsella Dwi Putri

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto Tembalang, Semarang

Jurnal Riptek

Volume 14 No. 2 (108 – 114)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 15 Oktober 2020

Direvisi: 12 November 2020

Disetujui: 23 November 2020

Tersedia online: 20 Desember 2020

Kata Kunci:

Ruang Terbuka Publik, Responsif Gender, Fasilitas Pendukung

Abstract.

Ruang terbuka sebagai fasilitas publik seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali, termasuk golongan berkebutuhan khusus seperti lansia, penyandang cacat, dan lainnya. Perhatian terhadap inklusifitas ruang terbuka publik diharapkan memenuhi kebutuhan fasilitas berdasarkan profil pengguna. Artikel ini menganalisis aspek responsif gender dari penyediaan fasilitas pendukung pada ruang publik di Kota Lama Semarang. Tujuan artikel ini menganalisis bagaimana ruang terbuka publik dapat memwadhahi kelompok masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka publik. Pengumpulan data melalui observasi lapangan dengan aspek amatan meliputi pedestrian, taman aktif, dan fasilitas pelengkap. Sebagai kesimpulan, artikel ini menggambarkan secara rinci terkait kondisi dan kelengkapan komponen fasilitas pendukung ruang terbuka publik. Namun perlu adanya peningkatan penyediaan, fokus pada keterwakilan ketersediaan fasilitas berdasarkan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Korespondensi penulis:

*landungesariti@lecturer.undip.ac.id

Cara mengutip:

Esariti, L; Ariyanti, K E; Putri, M D. 2020. Penyediaan Fasilitas Responsif Gender pada Ruang Terbuka Publik di Kota Lama Semarang. **Jurnal Riptek**. Vol. 14 (2): 108-114.

PENDAHULUAN

Ruang terbuka publik merupakan ruang yang dapat berfungsi sebagai sirkulasi dan juga dapat menjadi ruang untuk berekreasi yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat. Fasilitas yang disediakan pada ruang terbuka publik haruslah bersifat inklusif melihat dari fungsi ruang terbuka publik itu sendiri yang dapat memwadhahi kegiatan masyarakat. Melihat sisi inklusifitas ruang terbuka publik tersebut, maka perlu ada penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang responsif gender. Menurut (Esariti & Dewi, 2016) konsep responsif gender adalah pendekatan penyediaan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat diperlakukan secara adil. Pengertian gender sendiri dalam (Widyastuti & Agustin, 2019) merupakan konsep yang terkait dengan fungsi, peran dan tanggung jawab baik itu laki-laki maupun perempuan yang terbangun dan dapat berubah dikarenakan faktor dan kondisi sosial budaya dari masing-masing orang. Untuk penerapan konsep gender dalam perencanaan dan perancangan kota dalam masyarakat baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dan juga kelompok dengan keterbatasan fisik (difabel) maka pemenuhan kebutuhannya perlu disediakan fasilitas ruang publik yang adil dan inklusif mendukung kebutuhan mereka.

Fasilitas yang responsif gender tersebut dapat berupa pengadaan fisik atau perubahan dan rekayasa desain sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk beraktivitas dalam ruang terbuka publik. (Widyastuti & Agustin, 2019) juga menyebutkan terdapat lima kriteria untuk infrastruktur yang responsif gender yaitu yang pertama adalah infrastruktur untuk semua yang mana bertujuan untuk memenuhi aksesibilitas semua kalangan, yang kedua adalah infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan semua orang, yaitu menyediakan aksesibilitas yang adil baik untuk laki-laki, perempuan, orang lanjut usia, kaum difabel dan anak-anak. Yang ketiga adalah infrastruktur yang aman artinya infrastruktur yang bebas dari bahaya, yang keempat adalah infrastruktur yang nyaman dan yang kelima adalah infrastuktur yang ramah lingkungan. Tantangan perencanaan dan perancangan kota adalah bagaimana mengintegrasikan gender dalam program pembangunan (Moser, 2016; Horelli, 2017). Perencana kota harus mampu membedakan mana kebutuhan praktis yang krusial untuk segera diakomodir dan mana yang sifatnya pada tataran penyusunan desain dan program. Sebagai kota yang mendapat penghargaan berturut-turut untuk penerapan pengarusutamaan gender yang baik dari

Pemerintah Indonesia, berupa Anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2018, Kota Semarang perlahan membenahi perancangan kota, khususnya di kawasan Kota Lama Semarang. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan dan membuat nyaman pengguna yang menikmati fasilitas di kawasan Kota Lama Semarang.

Riset tentang ruang terbuka sudah banyak dilakukan, dari berbagai bidang ilmu. Definisi ruang terbuka yang paling sering dipakai adalah sebagai wadah sosialisasi, tempat beberapa kelompok masyarakat berkumpul dan bertukar pengalaman, menyampaikan opini dan membentuk ikatan sosial (Mehta, 2014; Carmona, 2015). Artikel ini akan menekankan pada pemahaman tentang definisi ruang terbuka sebagai fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali, termasuk golongan berkebutuhan khusus seperti lansia, penyandang cacat dan lainnya. Ruang terbuka publik seharusnya dilihat pada konteks hubungan sosial (Costamagna et al., 2019), maka disinilah gender berperan. Gender adalah perspektif yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan fasilitas seharusnya disesuaikan dengan profil pengguna. Gender memberikan ketrampilan dan kepekaan bagi perencana kota untuk mengintegrasikan aspek-aspek kritis perancangan kota yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang inklusif (Efendi, 2020; Esariti & Anggraini, 2017).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas bagaimana ruang terbuka publik dapat mawadahi kelompok masyarakat sebagai pengguna ruang terbuka publik. Ruang publik menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini adalah ruang terbuka untuk rekreasi dan ruang terbuka untuk pejalan kaki di Kota Lama Semarang serta membahas apakah ruang terbuka publik di Kota Lama Semarang sudah responsif terhadap gender dan inklusif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat serta memberikan rekomendasi untuk masalah inklusifitas yang ada pada ruang terbuka publik di Kota Lama Semarang. Ruang publik responsif gender penting karena menjadi elemen perencanaan kota yang berhubungan dengan bagaimana warga kota berinteraksi, dan sudah menjadi tugas pemerintah Kota Semarang untuk merencanakan fasilitas yang dapat dijangkau oleh semua kelompok masyarakat.

METODE ANALISIS

Artikel ini menggunakan teknik kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan. Aspek amatan diambil dari diskusi literatur yang diambil pada kasus aplikasi penerapan

perspektif gender pada perencanaan kota secara detail khususnya pada perencanaan fasilitas publik. Artikel yang menjadi referensi adalah sebagai berikut: a) Abdulla et al. (2017); b) Anne Kerstin Reimers dan Stephanie Schoeppe (2018); c) Norsidah Ujang dan Marek Kozlowski (2018); d) Khanna et al., (2015); dan e) Efendi (2020). Beberapa artikel rujukan juga mengambil studi kasus penerapan perencanaan fasilitas pdi kawasan bersejarah di negara lain, sebagai pembanding untuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran. Tabel I berikut ini merupakan aspek perencanaan fasilitas ruang terbuka publik yang akan diamati.

Tabel I. Daftar Aspek Amatan Fasilitas dalam Ruang Publik Kawasan Kota Lama Semarang

Aspek Ruang Publik	Sub Elemen	Ketersediaan
Pedestrian	Guiding block	Ada
	Street Furniture	Ada
	Zebracross	Ada
	Signage	Memberi petunjuk arah dengan jelas tersedia di beberapa titik dalam kawasan
Taman aktif	Akses	Minimal dari 2 sisi, untuk pengaturan arus masuk dan keluar
	Ramp	Wajib ada, untuk pengunjung berkebutuhan khusus.
	Bangku taman	Ada
	Mini playground	Ada
Fasilitas umum	Toilet	Ada, minimal ada 2 untuk pengunjung laki laki dan perempuan
	Mushola	Ada dan dilengkapi dengan tempat wudhu
	Cafe/ kedai makan	Ada
	Penerangan	Cukup dan tersebar merata dalam kawasan
	Keamanan	Ada, dengan radius per 1 km

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Teknik analisis yang dilakukan pada artikel ini menekankan pada perbandingan hasil observasi lapangan yang dilakukan sekitar bulan Juni 2020 dan indikator aspek amatan seperti yang terdapat pada Tabel I diatas. Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah pada Taman Srigunting dan sekitarnya sebagai ruang terbuka publik di Kawasan Kota Lama Semarang.



Sumber: Google Earth, 2020

Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Karakteristik Elemen Fasilitas Ruang Terbuka Publik Kawasan Kota Lama Semarang. Diketahui bahwa Kota Lama Semarang merupakan kawasan *heritage* di Kota Semarang yang sudah mendapat gelar World Heritage City oleh UNESCO. Menurut sejarahnya, Kota Lama Semarang merupakan pusat perekonomian utama di Kota Semarang pada zaman penjajahan Belanda sehingga didalamnya terdapat gedung-gedung tua dengan nuansa Eropa eksotis yang berpotensi menjadi kawasan wisata Kota Semarang (Yuliati, 2019). Kota Lama Semarang pada dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga sekarang mengalami proses revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi yang dilakukan adalah pada bangunan-bangunan tua yang bersejarah dan ruang terbuka yang ada seperti *pedestrian* yang lebih ramah pejalan kaki dan juga pada ruang terbuka hijau aktif seperti Taman Srigunting yang terdapat pada koridor utama Kawasan Kota Lama Semarang yaitu Koridor Letjen Suprpto. Namun untuk Taman Srigunting sendiri tidak banyak berubah dari sebelumnya hanya saja ditambahkan fasilitas seperti spot foto, keran air minum dan tong sampah yang lebih memadai.

Melihat dari konteks Kota Lama Semarang sebagai destinasi wisata di Kota Semarang, sudah sepatutnya perlu adanya penyediaan fasilitas umum pada ruang terbuka publik yang inklusif terhadap kebutuhan pengunjung Kota Lama Semarang. Pada kondisi sekarang ini, Kawasan Kota Lama Semarang terutama pada koridor utama yaitu Jalan Letjen Suprpto telah terbangun beberapa tarikan tempat wisata (*site attraction*) seperti Museum 3D, Galeri Seni, Galeri UMKM, berbagai Café, Taman Lampion dan Taman Srigunting. Namun, pengunjung Kota Lama Sema-

rang lebih banyak melakukan aktivitas di ruang terbuka publik seperti *pedestrian* dan taman karena selain dapat diakses secara gratis, fasilitas yang ada sekarang dinilai lebih memadai khususnya untuk pejalan kaki.

Pada sepanjang *pedestrian* terutama di koridor utama telah selesai di revitalisasi menjadi lebih ramah pejalan kaki yaitu dengan pelebaran jalur *pedestrian*, peletakan *street furniture* seperti bangku tempat istirahat di beberapa spot *pedestrian*, serta penanaman *guiding block* atau *tactile paving* di sepanjang *pedestrian* sehingga *pedestrian* juga dapat diakses oleh difabel terutama untuk tunanetra. Selain itu juga sudah terdapat penerangan yang cukup memadai dan dinilai cukup aman untuk dikunjungi pada malam hari. Dari segi desain, memang sudah mengalami perbaikan dari kondisi sebelumnya, sekarang sudah terdapat jalur pejalan kaki. Namun dari pengamatan secara langsung oleh penulis, terdapat beberapa spot di *pedestrian* yang dinilai kurang aman terutama bagi lansia dan anak-anak karena, pada jam-jam tertentu terutama saat *peak hour*, jalur jalan yang dilewati kendaraan bermotor di koridor Letjen Suprpto sangat ramai sehingga sangat tidak aman untuk menyeberang. Selain itu juga berbahaya bagi anak-anak dan lansia karena belum terdapat jalur khusus penyeberangan seperti contohnya *zebra cross* atau *signage* yang menandakan tempat menyeberang. Ditambah lagi belum terdapat peraturan dan penanda yang mengatur kecepatan pengendara di koridor tersebut sehingga pengendara motor masih banyak yang tidak memperhatikan laju kecepatan kendaraannya.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020

Gambar 2. Pedestrian dan Jalan di Kota Lama Semarang Koridor Letjen Suprpto

Terdapat faktor lain yang membahayakan pejalan kaki yaitu masih banyaknya pengendara motor yang masuk ke jalur *pedestrian* meskipun sudah terdapat pion-pion pembatas setinggi setengah meter dengan rantai yang dijuntakan. Hal tersebut mungkin terjadi akibat belum adanya penanda yang tegas untuk melarang masuknya pengendara motor ke ruang *pedestrian*, sehingga menyebabkan pejalan kaki merasa

was-was untuk berjalan di sepanjang *pedestrian*.

Taman Srigunting di sebelah timur Gereja Blenduk merupakan taman aktif sebagai ruang tempat pengunjung dapat duduk, bersantai dan berteduh karena adanya empat Pohon Angsana yang rindang terutama pada siang hari. Namun sayangnya beberapa fasilitas penunjang hingga akses masuk taman dinilai kurang responsif gender. Saat ini semua akses masuk pada Taman Srigunting masih berupa tangga tanpa adanya *ramp*. *Ramp* sangat diperlukan untuk disediakan pada fasilitas publik mengingat salah satu kriteria responsif gender adalah fasilitas yang memperhatikan kebutuhan setiap kelompok orang dan salah satunya adalah kelompok difabel atau kelompok orang yang terbatas fisiknya (Wang et al., 2015). Tidak adanya *ramp* pada akses masuk taman membuat taman tersebut belum memenuhi kriteria fasilitas yang responsif gender. Selain masalah akses masuk, terdapat beberapa masalah lain yaitu fasilitas taman seperti kondisi bangku taman yang dinilai kurang nyaman digunakan oleh lansia. Hal ini dikarenakan bangku taman eksisting masih terbuat dari batu yang cukup keras tanpa adanya sandaran. Ringkasnya, kelompok pengguna lansia tidak nyaman dan kurang dapat menikmati waktu duduk santai di sana.

Fasilitas taman sebagai ruang terbuka publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua golongan dinilai belum ramah bagi anak-anak (Goličnik & Ward Thompson, 2010). Hal ini ditunjukkan dari tidak tersedianya pengadaan fasilitas yang dapat digunakan oleh anak-anak seperti contohnya *mini playground*, atau beberapa permainan yang dapat digunakan anak-anak. Tidak adanya fasilitas untuk anak-anak menyebabkan fungsi taman sebagai ruang terbuka publik menjadi kurang optimal. Lantai perkerasan dalam kawasan Kota Lama Semarang seharusnya juga dipertimbangkan. Taman dapat menjamin kesehatan dengan mendorong fungsi motorik berkembang, misal dengan terapi jalan untuk kesehatan. Sehingga sebaiknya lantai taman dibuat dengan perkerasan berbeda, ada yang menggunakan, aspal, *paving block* dan tanah berumput. Ini sesuai dengan yang disampaikan dalam (Wang et al., 2015) dan (Urban Development Vienna., 2013), bahwa unsur responsif gender memang memuat pengaturan detail. Taman berumput dimanfaatkan untuk kelompok lansia dan anak-anak. Taman dengan *paving block* untuk pejalan kaki dan pesepeda.



Sumber: Dokumen Penulis, 2020

Gambar 3. Tempat Duduk pada Salah Satu Spot Taman Srigunting

Selain fasilitas pendukung dalam taman, terdapat masalah lain pada ruang terbuka publik yaitu masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sisi pedestrian yang berada di sekitar taman. Kemungkinan dikarenakan Taman Srigunting sendiri merupakan jantung dari Kota Lama Semarang sebagai pusat berkumpulnya pengunjung. Sebelumnya memang sudah terdapat area pedagang kaki lima khusus barang antik yang berjualan di sebelah timur Taman Srigunting. Kelompok pedagang ini direlokasi ke salah satu gedung tua yang tidak difungsikan, dan sekarang menjadi pusat barang antik dengan tema *One Stop Shopping*.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020

Gambar 4. Pedagang Kaki Lima di Jalur Pedestrian

Kondisi lain adalah banyaknya pedagang kaki lima penjaja makanan (*street food*) hingga penjaja mainan anak-anak. Konsentrasi pedagang kaki lima ini menunjukkan bahwa ruang terbuka publik Kawasan Kota Lama merupakan ladang rezeki bagi para pedagang kaki lima. Tidak manusiawi rasanya apabila melarang para pedagang kaki lima untuk turut mencari rezeki di Kawasan kota Lama Semarang. Ini terkait makna ruang terbuka publik sebagai tempat

aktualisasi kebutuhan (ekonomi) dan hak penggunaannya (Dewi, 2015). Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengatur pemanfaatan ruangannya agar adil dan inklusif.

Terkait kondisi dan ketersediaan fasilitas umum di Kawasan Kota Lama Semarang sekarang ini, sudah ada pembangunan toilet umum di Kawasan Kota Lama di sebelah timur Taman Srigunting. Terdapat empat bilik toilet dengan *closet* dan *shower* kecil yang dilengkapi dengan sabun dan tempat sampah. Namun saat ini hanya dua bilik yang dapat digunakan, sisanya direkomendasikan oleh pemerintah untuk menggunakan toilet di dalam bangunan Cafe atau bangunan-bangunan yang ada. Ini merupakan pembatasan penggunaan karena tidak semua pengunjung berkenan melakukannya. Sayangnya, belum terdapat inisiasi pemerintah untuk membangun toilet untuk difabel. Jika dilihat di negara ASIA lain seperti di Singapura dan Korea Selatan, ruang terbuka publik seperti taman selalu tersedia toilet khusus difabel. Selain toilet, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengunjung karena belum tersedia adalah mushola khusus untuk pengunjung Kawasan Kota Lama. Pengunjung dapat menggunakan Mushola Al Hikmah milik asrama CPM, yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki sekitar 160 meter dari Taman Srigunting. Kesimpulannya, toilet umum dan mushola pengunjung menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketersediannya dalam ruang publik oleh pemerintah, terutama jika ingin menetapkan Kawasan Kota Lama menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Dengan pertimbangan mayoritas pengunjung bukan penduduk asli Semarang yang tidak terlalu mengenal Kawasan Kota Lama. Ini menandakan pentingnya penyediaan toilet dan mushola di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau pengunjung. Pengaturan mushola dan toilet sebaiknya dilengkapi juga dengan *signage* dan penerangan yang cukup memadai.

Analisis Perencanaan Aspek Fasilitas Ruang Publik yang Responsif Gender di Kawasan Kota Lama Semarang. Berdasarkan permasalahan pada kondisi eksisting, maka dapat dinilai bahwa pembangunan Kawasan Kota Lama sebagai destinasi wisata bagi segala kalangan belum cukup tuntas karena beberapa fasilitas publik belum sepenuhnya mewadahi beberapa golongan pengguna seperti *pedestrian* yang dinilai kurang aman bagi pejalan kaki terutama bagi anak-anak dan lansia, taman aktif yang masih belum dapat diakses beberapa golongan seperti difabel dan lansia, taman aktif yang masih belum mewadahi aktivitas rekreasi anak-anak, belum tersedianya tempat khusus pedagang kaki lima yang

berjualan di dekat taman dan belum tersedianya fasilitas umum seperti toilet untuk difabel dan mushola yang dibutuhkan oleh umat muslim. Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan penulis.

Terkait dengan *pedestrian* yang dinilai kurang aman, perlu adanya penanda pada beberapa bagian jalan atau tempat untuk menyeberang agar dapat diperhatikan oleh pengendara motor untuk memberikan ruang bagi penyeberang. Selain itu perlu penyediaan *zebra cross* atau garis penanda untuk menyeberang jalan agar para pejalan kaki terutama anak-anak dan lansia lebih merasa aman untuk menyeberang. Selain penyeberangan, terkait dengan adanya motor yang melintas di jalur *pedestrian* maka perlu diletakkan penanda yang jelas untuk melarang pengendara kendaraan bermotor untuk melintasi jalur *pedestrian* (Abdulla et al., 2017). Selanjutnya terkait dengan masalah fasilitas publik berupa perabot taman yang dinilai kurang nyaman digunakan oleh lansia, taman yang belum mewadahi kegiatan anak-anak dan akses menuju taman yang tidak dapat diakses oleh difabel, maka perlu adanya penyediaan perabot taman yang lebih ramah terhadap lansia. Seperti bangku taman dengan sandaran yang dibuat untuk kenyamanan pengunjung terutama kelompok lansia. Dibawah ini, direkomendasikan bentuk bangku taman yang mungkin bisa menjadi alternatif penyediaan. Selain kontsruksinya sederhana, perawatannyapun relatif mudah dan murah.



Sumber: Google Image, 2020

Gambar 5. Alternatif Desain Bangku Taman

Penting untuk menyediakan kebutuhan *mini playground* atau beberapa permainan yang dapat diakses oleh anak-anak tanpa mengabaikan aspek keamanan (Anne Kerstin Reimers, Stephanie Schoeppe, 2018), adanya *ramp* pada akses masuk taman sehingga kelompok difabel dapat turut menikmati fasilitas taman sebagai ruang publik yang inklusif. Untuk pedagang kaki lima (PKL) yang belum memiliki tempat berjualan, perlu ada pengaturan alokasi tempat khusus berjualan makanan di sekitar Taman Srigunting. Seperti yang direkomendasikan oleh (Norsidah Ujang, Marek Kozlowski, 2018) bahwa ruang

terbuka publik seharusnya mempunyai fungsi sosial untuk melakukan interaksi yang bermanfaat bagi pengguna. Sehingga pengaturan PKL seharusnya melibatkan perubahan perilaku baik bagi pedagang maupun pembelinya. Pengaturan kegiatan dalam Kawasan Kota Lama Semarang disesuaikan dengan pola aktivitas pengunjung dan pedagang. Interaksi antara pedagang dan pengunjung akan membentuk ruang teritori yang cenderung bersifat semi privat bagi pedagang (Hantono, 2017), (Hantono & Pramitasari, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengelompokan aktivitas dalam ruang terbuka publik menjadi penting untuk dilakukan. Kesesuaian peletakan dan peruntukan lokasi dengan aktivitas menjadi salah satu komponen prasyarat responsif gender. Fasilitas pendukung tersebut menjadi spesifik penyediaannya karena benar-benar bertujuan untuk mengakomodir keterwakilan kebutuhan kelompok pengunjung yang berbeda-beda. Kebutuhan mendesak yang perlu ada di Kawasan Kota Lama adalah toilet khusus difabel dan ruang laktasi untuk ibu dan anak.

Pemetaan kebutuhan ini tentunya harus melibatkan peran serta pengunjung. Sehingga penting bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melibatkan beberapa kelompok masyarakat untuk ikut mendiskusikan kebutuhan mereka dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang. Tujuannya jelas, agar dalam pembangunan kawasan dan penyediaan fasilitas publik, semua golongan dan kelompok masyarakat dapat terwadahi secara optimal secara adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Artikel ini telah secara detail menggambarkan kondisi penyediaan fasilitas pendukung ruang terbuka publik Kawasan Kota Lama Semarang. Sesuai dengan tujuan artikel ini untuk menganalisis penyediaan fasilitas yang responsif gender, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyediaannya cukup responsif gender. Dengan kata lain, bila diamati secara kelengkapan komponen fasilitas pendukung ruang terbuka publik, semua komponen telah lengkap dan tersedia di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun secara kualitas, perlu ada peningkatan penyediaan. Khususnya dalam hal keterwakilan ketersediaan fasilitas berdasarkan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, seperti kelompok lansia, difabel, penyandang cacat dan anak-anak balita.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulla, K. M. A., Abdelmonem, M. G., & Selim, G. (2017). Walkability In Historic Urban Spaces :

Testing The Safety And Security In Martyrs ' Square In Tripoli. *International Journal of Architectural Research*, 11(3), 163–177.

Anne Kerstin Reimers , Stephanie Schoeppe, Y. D. and G. K. (2018). Physical Activity and Outdoor Play of Children in Public Playgrounds — Do Gender and Social Environment Matter? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15, 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph15071356>

Carmona, M. (2015). Re-theorising contemporary public space: a new narrative and a new normative. *Journal of Urbanism*, 8(4), 373–405. <https://doi.org/10.1080/17549175.2014.909518>

Costamagna, F., Lind, R., & Stjernström, O. (2019). Livability of Urban Public Spaces in Northern Swedish Cities : The Case of Umeå Livability of Urban Public Spaces in Northern Swedish Cities : The Case of Umeå. *Planning Practice & Research*, 34(2), 131–148. <https://doi.org/10.1080/02697459.2018.1548215>

Dewi, D. I. K. (2015). Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Berdasarkan Gaya hidup di Kota Semarang. *Conference on URBAN STUDIES AND DEVELOPMENT :Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaan Yang Berkeadilan*, 1–7.

Efendi, Y. (2020). Urgensi Infrastruktur Ramah Gender Dalam Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Di Ruang Publik. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(2), 1–24. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2368>

Esariti, L., & Anggraini, P. (2017). Perspektif Gender Dalam Perencanaan Infrastruktur Publik Kota Semarang. *Konferensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun Ull*.

Esariti, L., & Dewi, D. I. K. (2016). Pendekatan Responsif Gender Dalam Penyediaan Sarana Lingkungan Perkotaan. *Ruang*, 2(4), 324–330.

Goličnik, B., & Ward Thompson, C. (2010). Emerging relationships between design and use of urban park spaces. *Landscape and Urban Planning*, 94(1), 38–53. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.07.016>

Hantono, D. (2017). Pola Aktivitas Ruang Terbuka Publik. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 11(6), 265–277.

Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhhluk Individu dan Sosial. *National Academic Journal of Architecture (Nature)*, 5(2), 85–93.

Horelli, L. (2017). Engendering urban planning in different contexts – successes , constraints and consequences. *European Planning Studies*,

- 0 (0) , 1 – 1 8 . <https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1339781>
- Khanna, T., Das, M., Khanna, T., & Das, M. (2015). Why gender matters in the solution towards safe sanitation? Reflections from rural India Why gender matters in the solution towards safe sanitation? *Global Public Health An International Journal for Research, Policy and Practice*, 1692 (November). <https://doi.org/10.1080/17441692.2015.1062905>
- Mehta, V. (2014). Evaluating Public Space. *Journal of Urban Design*, 19(1), 53–88. <https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698>
- Moser, C. O. N. (2016). Gender transformation in a new global urban agenda: challenges for Habitat III and beyond. *Environment and Urbanization*, 29(Habitat III), 221–236. <https://doi.org/10.1177/0956247816662573>
- Norsidah Ujang, Marek Kozlowski, S. M. (2018). Linking place attachment and social interaction: towards meaningful public places. *Journal of Place Management and Development*, 11 (1), 115–129. <https://doi.org/10.1108/JPMD-01-2017-0012>
- Urban Development Vienna. (2013). *Legal Notice: Manual for Gender Mainstreaming In Urban Planning and Urban Development*. Urban Development Vienna. Municipal Department 18 (MA18) - Urban Development and Planning.
- Wang, D., Brown, G., Zhong, G., Liu, Y., & Mateo-Babiano, I. (2015). Factors influencing perceived access to urban parks: A comparative study of Brisbane (Australia) and Zhongshan (China). *Habitat International*, 50, 335–346. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.032>
- Widyastuti, Y., & Agustin, H. (2019). Gender Responsiveness on Public Facilities in Terminal Type A of Pakupatan, Serang City. *International Conference of Democratisation in Southeast Asia*, 367(ICDeSA), 217–220.
- Yuliati, D. (2019). Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya Sebagai As-set Pariwisata Budaya. *Anuva*, 3(2), 157–171.